

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.M Yunus Wahid, 2014, *Pengaturan Hukum Tata Ruang*, Kencana, Jakarta
- Aca Sugandhy dan Rustam Hakim, 2009, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Arba, 2017, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*,
- Ganjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta.
- Josep Riwo M Kaho, 1982, *Analisa Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Juniar Ridwan dkk, 2013, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Cedikia, Bandung.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nirwana Joga dan Iwan Ismaun, 2011, *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Prayudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.

Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

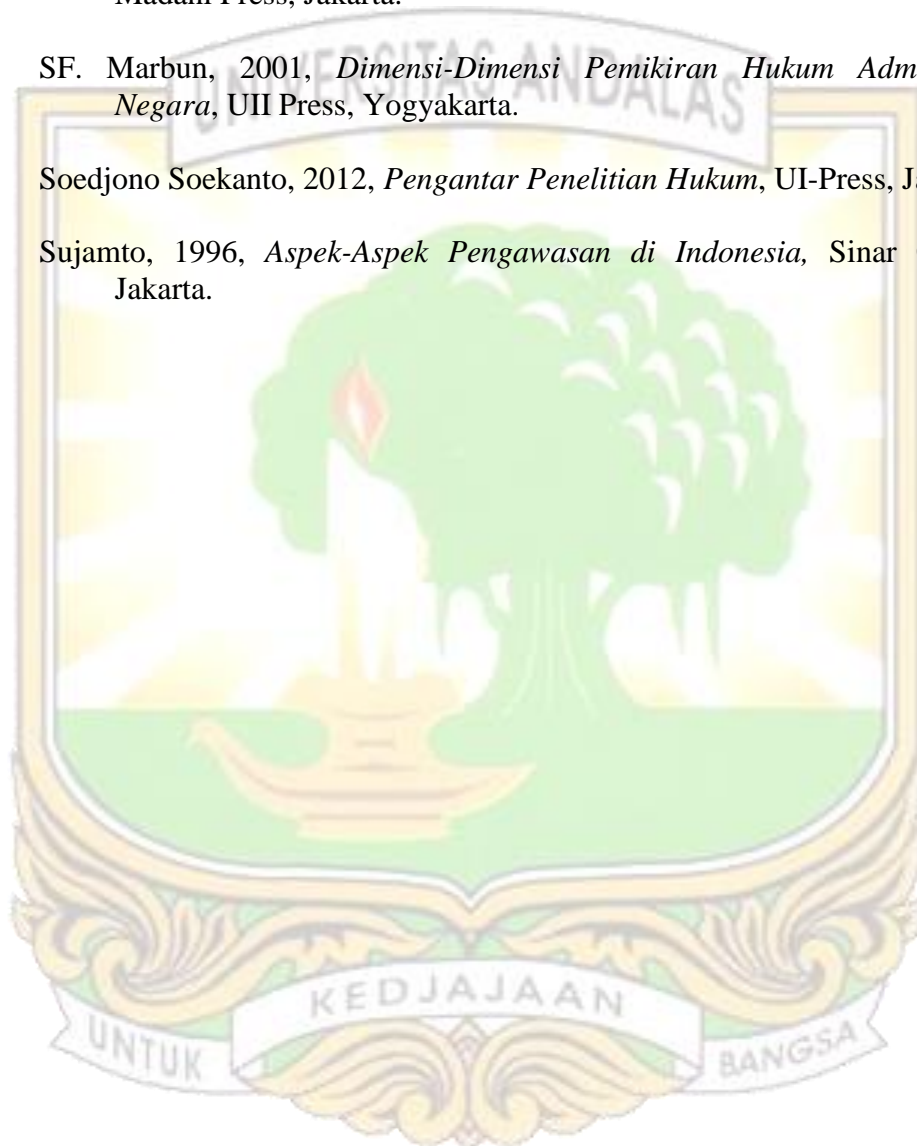
Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pres, Jakarta.

Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Gloria Madani Press, Jakarta.

SF. Marbun, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

Soedjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sujanto, 1996, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.



B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang
Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di
Kawasan Perkotaan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033;

Peraturan Bupati Bungo Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Bagan Struktur Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

C. Karya Tulis Ilmiah

Anton Rosari, Darnis, Dilla Wirda Putri, 2019, Pengaturan Penyediaan
Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kota Bukittinggi, Penelitian
Fakultas Hukum, Unand, Padang.

Nopitasari Suparjo, 2016, Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kota Makassar, Skripsi
Universitas Hasanuddin, Makassar.

Siti Marcelinna Nabila, 2019, Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan
Perkotaan Oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Skripsi Universitas
Andalas, Padang.

Sulistyo Wibowo, 2019, Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang
Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang di Kota Surakarta Skripsi
Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

D. Website

Agus Suparman, dkk “Ruang Terbuka Hijau Kota”, melalui <http://veronika.staff.gunadarma.ac.id>, diakses 15 Januari 2021, Pukul 10:00Wib.

